



Manajemen Berbasis Sekolah: Sejarah dan Strategi Implementasi Pada Satuan Pendidikan

Yusri A. Boko¹, Amrin Sibua²

¹Dosen STKIP Kie Raha Ternate

²Dosen Universitas Pasifik Morotai

Email: bokoyusri@gmail.com, sibuaambrin@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Oktober 2021

Direvisi: 14 November 2021

Dipublikasikan: November 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5717447

Abstract:

Article 51 paragraph (1) of Law Number 20 of 2003 concerning Education System states: Management of early childhood education units, basic education, and secondary education is carried out based on Minimum Service Standards with the principle of School-Based Management (SBM). This article aims to discuss a brief history and strategy for implementing SBM in schools. The approach in this paper is literature study. The term MBS first appeared in the United States in 187, when people began to question the relevance of education to the demands of its development. In Indonesia, SBM was born as a school reform agenda, which was marked by the RI Law No. 22/1999 and the RI Law No. 25/1999 on Regional Autonomy. Strategies in implementing SBM include: 1) one of the strategies is to create conducive preconditions to be able to implement SBM, namely increasing the capacity and commitment of all school members, including the community and parents of students, 2) building a democratic, transparent school culture, and accountable, 3) when the central government plays a more monitoring and evaluation role. This means that the central and local governments need to carry out joint activities in the context of monitoring and evaluating the implementation of SBM in schools, including the implementation of block grants in schools, 4) developing a model of school empowerment programs, not just carrying out SBM training, which is mostly fulfilled by providing school information. However, the development of MBS in America and Atlanta is certainly different from that in Indonesia because it depends on the government's "political will".

Keywords: SBM History, Strategy, Education Implementation

PENDAHULUAN

Salah satu problem pendidikan saat ini ialah rendahnya mutu pendidikan disetiap jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai macam usaha telah dilakukan, misalnya melalui pelatihan dan peningkatan kualitas guru, penyediaan serta perbaikan SARPRAS dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebagian satuan pendidikan di kabupaten/kota menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, sebagian lainnya masih memprihatinkan. Sedikitnya ada tiga faktor penyebab mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata: a) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen, b) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat bergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat, c) sangat minimnya peran serta masyarakat, khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sekolah adalah salah satu tripusat pendidikan yang dituntut untuk mampu menjadikan *output* yang unggul. Adapun upaya dalam mendesain organisasi sekolah terdiri beberapa tim administrasi sekolah yang terdiri atas kelompok orang yang bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Salah satu program peningkatan mutu pendidikan ialah meningkatkan mutu pengelolaan dan kepemimpinan kepala sekolah melalui kegiatan supervisi pengajaran, yang kadang tidak dilakukan oleh kepala sekolah.

Dari kenyataan itulah perlu

dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan tersebut melalui Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*). *School Based Management* merupakan penyeserasian sumberdaya yang dilakukan secara mandiri, dilakukan oleh sekolah dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan sekolah secara langsung di dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi mutu sekolah. Esensi MBS adalah otonomi manajemen sekolah, dari sisi pengambilan keputusan, partisipasi mencapai sasaran mutu sekolah. Desentralisasi diartikan sebagai kewenangan dan kemandirian dalam mengatur serta mengurus dirinya. Otonomi sekolah merupakan kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekolah, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Sekolah akan melaksanakan keinginan masyarakat sebagai pendukung (*stakeholders*), yang terdiri dari orang tua siswa, pelaku ekonomi, masyarakat, lingkungan sosial yang mempunyai tuntutan pendidikan, kebutuhan pembangunan setempat, hingga kebijakan otonomi daerah untuk mempercepat kemajuan, Jamal Ma'mur (Fajrin, 2018).

MBS memerlukan rencana-rencana strategis yang mampu menciptakan perubahan-perubahan yang berarti. Proses perubahan itu menyangkut perbaikan kurikulum dan program, menciptakan peran baru bagi guru dan kepala sekolah, dan perbaikan dalam evaluasi belajar yang mengacu pada *output* sekolah, yakni kinerja sekolah, Brian John Caldwell (Fajrin, 2018).

Secara konsep MBS membawa dampak atas peningkatan kinerja sekolah dalam hal mutu, efisiensi manajemen keuangan, pemerataan kesempatan dan pencapaian tujuan politik atau

perkembangan iklim demokrasi suatu bangsa lewat perubahan kebijakan otonomi diberbagai aspek politik, pendidikan, administrasi dan anggaran pendidikan. Implementasi MBS yang paling ditekankan ialah peran *leadership* sekolah. Kepala sekolah harus memiliki perencanaan dan manajemen *timework* yang meliputi orang tua peserta didik, guru administrator dan profesional lainnya di sekolah.

Masalah dihadapi dalam implementasi MBS dapat dilihat dari beberapa komponen, misalnya pada komponen: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran serta PAKEM. Manajemen peserta didik ada 8 masalah, yaitu pendataan, orientasi, pembinaan, ekstrakurikuler, layanan khusus, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, dan pembinaan prestasi unggul (Mustiningsih, 2015).

Kepala sekolah melayani kepemimpinan tim dengan tujuan menciptakan rencana dan sasaran peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang dipimpinnya. Strategi implementasi MBS di satuan pendidikan membutuhkan kerja keras semua pihak, kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. Memang masih banyak kepala sekolah yang belum begitu paham dalam strategi implementasi MBS pada satuan pendidikan. Sehingga otonomi sekolah masih dipandang sebagai hal biasa atau tidak berpengaruh pada pengembangan mutu pembelajaran.

Manajemen strategi dalam *School Based Management* memang sangat dibutuhkan. Manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian, Hunger

(Mulyasa, 2012: 161). Sehubungan dengan itu, sejarah dan strategi implementasi MBS harus menjadi prioritas kepala sekolah untuk memahami. Kepala sekolah yang memahami sejarah dan strategi implementasi MBS akan lebih condong mandiri dan tidak bergantung pada pendanaan negara untuk memajukan sekolah.

Dengan demikian, tulisan: “Manajemen Berbasis Sekolah”: Sejarah dan Strategi Implementasi Pada Satuan Pendidikan. Memiliki tujuan untuk mengulas sejarah singkat dan strategi implementasi MBS di sekolah dengan menggunakan pendekatan studi pustaka.

PEMBAHASAN

Sejarah Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan atas *School Based Management*. *School Based Management* pertama kali muncul di Amerika Serikat, ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ialah paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah, atau kata lain pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumberdaya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai prioritas atau kebutuhan, (Aziz, 2015).

Di Amerika Serikat, lahirnya perjuangan guru untuk memperbaiki nasibnya dianggap sebagai cikal bakal Otonomi Manajemen Sekolah (OMS) atau desentralisasi pengelolaan satuan pendidikan, dan perjalanannya berlangsung cukup panjang, yaitu dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan Nasional (*National Education Association*) pada tahun

1857.

Negara seperti Atlanta, guru-guru membentuk kumpulan atau kesatuan Guru-guru Sekolah Negeri Atlanta, guna menghadapi tekanan dari Dewan Kota yang akhirnya memberikan dana lebih untuk pendidikan. Tujuannya memberi pilihan bagi guru dalam menentukan kebijakan sekolah (*school policy*) untuk memperoleh wakil dipentas pendidikan di *New York*, membantu masalah-masalah di satuan pendidikan, membersihkan politik Amerika Serikat dari keputusan yang menyimpang serta meningkatkan kebebasan diskusi publik dari masalah-masalah pendidikan di Atlanta.

Negara maju seperti Amerika Serikat, reformasi pendidikan, khusus reformasi manajemen pendidikan, selama lebih dari empat puluh tahun terakhir terus berporos pada desentralisasi pendidikan. Namun, bagaimana dengan perjalanan MBS di Indonesia? Secara relatif MBS baru dimulai sejak tahun 1999/2000, yaitu dengan peluncuran dana bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) (Danim, 2010: 41).

Di Indonesia MBS lahir sebagai agenda reformasi sekolah, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, baik dalam kaitan dengan Pemerintah Daerah maupun perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang kemudian menjadi alasan munculnya desentralisasi pendidikan.

MBS (*School Based Management*) merupakan satu jawaban pemberian otonomi daerah dibidang pendidikan. Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdikas) pasal 51 ayat (1): pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Desentralisasi pendidikan diharapkan dapat mendorong, meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan bermuara kepada upaya peningkatan, pengelolaan pendidikan dalam tataran yang paling bawah (*at the botton*) yakni sekolah melalui penerapan MBS. MBS sebagai suatu model implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan suatu konsep inovasi, yang bukan hanya dikaji sebagai wacana baru dalam pengelolaan pendidikan tetapi sebaiknya juga dipertimbangkan sebagai langkah inovasi yang strategis ke arah peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan manajemen yang bercirikan akar rumput.

Sekolah negeri di Indonesia mulai menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sejak 2001. Esensi MPMBS ialah otonomi sekolah dan manajemen partisipasif, Depdiknas, (Boko, 2021: 216).

Namun pelaksanaannya masih ada yang bermasalah seperti di Kalimantan Timur, ternyata sekolah dilarang oleh Bupati/walikota memungut biaya sekolah dari masyarakat dengan alasan sekolah sudah mendapat subsidi bebas SPP dan BP3 dari PEMDA. Subsidi SPP/BP3 sebenarnya tidak cukup untuk melaksanakan program sekolah karena relatif masih sedikit. Kurang mulusnya pelaksanaan otonomi daerah, dan bervariasinya kemampuan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Dikarenakan sekolah kesulitan dana, akibat sekolah bagaikan hidup segan dan mati tak mau (Usman, 2011: 631).

Sejarah MBS memang bukan hanya berkembang di Amerika Serikat saja, melainkan juga di Kanada dan negara lainnya. Hal ini tentu berbeda secara penamaan atau istilah. Namun, yang menjadi poin penegasan adalah MBS merupakan otonomi manajemen sekolah (OMS). Di sini, *stacholders* memainkan perannya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam membangun mutu pendidikan di sekolah.

Perkembangan MBS di Amerika dan Atlanta tentunya berbeda dengan di Indonesia. Hal ini karena tergantung dari "*politik will*" pemerintah di bidang pendidikan yang kurang begitu baik. Di Indonesia mental pejabatnya masih terjebak pada persolan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dan ini mempengaruhi sampai pada praktisi pendidikan di satuan pendidikan.

Tujuan dan Ciri-ciri Sekolah "berdaya" Prespektif MBS

Tujuan dilaksanakan MBS adalah untuk memberdayakan sekolah, terutama sumberdaya manusia yang terdiri atas kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, karyawan, dan masyarakat. Semuanya dilakukan melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumberdaya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah bersangkutan.

Intinya, peningkatan MBS tanpa akuntabilitas adalah retorika, sebaliknya, akuntabilitas tanpa peningkatan mutu adalah perbuatan yang sia-sia belaka. Meningkatkan strategi pengawasan mutu dapat digunakan melalui kepemimpinan sekolah. Adapun kerjasama yang dibangun antara

pemangku kepentingan menjadi penting untuk penerapan MBS.

Ciri-ciri sekolah yang berdaya adalah; a) tingkat kemandirian tinggi, b) tingkat ketergantungan rendah, c) bersifat adaptif, antisipatif, dan proaktif, d) memiliki jiwa kewirausahaan tinggi, e) bertanggungjawab terhadap hasil sekolah, f) memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumberdaya, g) kontrol terhadap kondisi kerja, h) komitmen yang tinggi pada dirinya, dan i) dinilai oleh pencapaian prestasinya (Hamid, 2013).

Selanjutnya ciri-ciri sumberdaya manusia sekolah yang berdaya, a) pekerjaan adalah miliknya, b) dia bertanggungjawab, c) dia memiliki suara bagaimana sesuatu dikerjakan, d) pekerjaannya memiliki kontribusi, e) dia tahu posisinya di mana, f) dia memiliki kontrol terhadap pekerjaannya, g) pekerjaan merupakan bagian hidupnya (Hamid, 2013).

Tujuan utama *School Based Management* adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adanya MBS, sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pusat, melainkan sekolah dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri. Depdiknas telah melakukan penyesuaian terhadap pendekatan manajemen pendidikan yaitu dari manajemen berbasis pusat ke manajemen berbasis sekolah, seperti yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1. Pendekatan manajemen pendidikan yaitu dari manajemen berbasis pusat ke manajemen berbasis sekolah

Manajemen Berbasis Pusat	Menuju	MBS
Sub-ordinasi	➔	Otonomi
Pengambilan keputusan		Pengambilan keputusan
Terpusat		Partisipatif
Ruang gerak kaku		Ruang gerak luwes
Pendekatan birokratik		Pendekatan profesionalisme
Sentralistik		Desentralistik
Diatur		Motivasi diri
Overregulasi		Deregulasi
Mengontrol		Mempengaruhi
Mengarahkan		Memfasilitasi
Menghindari resiko		Mengolah resiko
Gunakan uang semuanya		Gunakan uang seefisien mungkin
Individual cerdas		Teamwork kompak dan cerdas
Informasi terribadi		Informasi terbagi
Pendelegasian		Pemberdayaan
Organisasi hierarkis	Organisasi datar	

Sumber: Slamet PH (Hamid, Jurnal: Al-Khwarizmi, 2003).

Tabel di atas menjadi acuan kalau sentralisasi dan desentralisasi mengandung perbedaan. Desentralisasi sendiri merupakan tumpangan dari MBS. Perbedaan dari paradigma pendidikan yang awalnya berpusat di Jakarta kemudian dilimpahkan kepada daerah. Tabel ini menunjukkan perbedaan antara Manajemen Berbasis Pusat (MBP) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Wahyudi (2010), MBS memiliki tujuan sebagai berikut: 1) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia, 2) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, 3) meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah terkait mutu sekolah, 4) meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah untuk pencapaian mutu

pendidikan yang diharapkan, dan 5) memberdayakan potensi sekolah yang ada agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan MBS antara lain, 1) komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS; 2) kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber-MBS; 3) keterlibatan, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak mendidik anak; 4) kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif; 5) keputusan, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan; 6) kesadaran, guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum; 7) kemandirian, sekolah harus diberikan otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana; dan 8) ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan *stakeholders* sekolah, Usman (Boko dkk, 2021: 216).

MBS atau lebih dikenal sebagai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) wajib diketahui, dihayati, dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia terutama mereka yang berkecimpun di dunia pendidikan anak usiadini, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah.

Intinya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan upaya terus-menerus untuk memperbaiki kinerja sekolah dengan memposisikan sekolah sebagai institusi yang relatif otonom. Armin Haluti (2019) mengungkapkan prinsip-prinsip MBS adalah: 1) fokus

pada pelanggan, 2) pelibatan menyeluruh (*teamwork*), 3) pengukuran (*measurements*), 4) komitmen, dan 5) perbaikan secara terus-menerus.

MBS belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kekeliruan dalam praktik manajemen PTK, misalnya perencanaan kebutuhan, rekrutmen atau pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan, pemberian motivasi, rotasi kerja, pengawasan, evaluasi kinerja serta pelaporan. Belum lagi manajemen SARPRAS dan RKAS. Hal ini membuktikan kalau kepemimpinan kepala sekolah belum mampu menerapkan otonomi sekolah secara baik.

Dengan demikian, MBS (*School Based Management*) pada prinsipnya bertumpu pada sekolah serta masyarakat, serta jauh dari birokrasi (sentralistik), di mana MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat satuan pendidikan. Kehadiran MBS, idealnya lebih dari sekedar perubahan pola manajemen sekolah, melainkan diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu manajemen sekolah, perbaikan mutu proses dan produk pembelajaran. MBS memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keleluasan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (pendidik, peserta didik dan kepala sekolah).

Strategi Implementasi *school Based Management*

Strategi implementasi MBS membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang memiliki *vision* (visi) yang jelas, dalam arti sebenarnya dan dalam arti singkatan. *Vision* dalam

arti singkatan adalah setiap pemimpin harus memiliki visi, *inspiration* (memberi ilham), *strategy orientation* (orientasi jangka panjang), *integrity* (integritas), *organizational sophisticated* (memahami dan berorganisasi dengan canggih), dan *nurturing* (memelihara keseimbangan, keharmonisan antara tujuan sekolah dan tujuan individu warga sekolah atau peka terhadap tujuan individu bawahannya).

Fajrin, (2018) strategi yang digunakan dalam penerapan MBS ialah:

- 1) Salah satu strategi adalah menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS, yaitu peningkatan kapasitas serta komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa.
- 2) Pembangunan budaya sekolah (*school culture*) yang demokratis, transparan, dan akuntabel.
- 3) Ketika pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Artinya pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS di sekolah, termasuk pelaksanaan *block grant* yang diterima sekolah.
- 4) Mengembangkan model program pemberdayaan sekolah, bukan hanya sekedar melaksanakan pelatihan MBS saja, yang lebih banyak dipenuhi dengan pemberian informasi sekolah.

Strategi implementasi MBS bisa berbeda-beda antara negara, antara daerah bahkan antara sekolah dalam satu daerah. Umumnya, (Fajrin, 2018) menjelaskan, implementasi MBS akan berhasil apabila melalui strategi-strategi berikut:

- 1) Sekolah harus memiliki otonomi dalam empat hal, yakni memiliki otonomi dalam kekuasaan dan

- kewenangan, pengembangan pengetahuan, serta keterampilan secara berkesenambungan, akses informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil.
- 2) Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam persoalan pembiayaan, poses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional dan non-instruksional.
 - 3) Adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumberdaya sekolah secara efektif terutama kepala sekolah secara umum.
 - 4) Kepala sekolah dalam implementasi MBS berperan sebagai *designer*, motivator, dan fasilitator.
 - 5) Semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawab secara sungguh-sungguh untuk bisa memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing harus ada sosialisasi terhadap MBS.
 - 6) Adanya *guidelines* dari Departemen Pendidikan terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif.
 - 7) Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.
 - 8) Implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing, pembangunan kelembagaan (*capacity building*), mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan

dilakukan perbaikan-perbaikan.

- 9) Kepala sekolah harus dapat memilih strategi yang cocok, dan dapat digunakan dengan situasi dan kondisi sekolah. Suatu strategi dapat berjalan dengan lancar pada suatu sekolah belum tentu dapat berjalan lancar pada sekolah lain. Karena banyak faktor yang mempengaruhi, agar dapat berjalan dengan baik, maka salah satunya ialah faktor manusianya terutama kepemimpinan kepala sekolah. Dengan demikian, strategi implementasi MBS membutuhkan kerjasama bagi semua pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, orang tua, guru, komite sekolah, siswa dan administrasi sekolah. Bahkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, katakanlah pemerintah, baik camat, lurah atau kepala desa.

KESIMPULAN

Istilah MBS pertama kali muncul di Amerika Serikat, ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan pekungannya. Di Amerika Serikat, lahirnya perjuangan guru untuk memperbaiki nasibnya dianggap sebagai cikal bakal Otonomi Manajemen Sekolah (OMS) atau desentralisasi pengelolaan satuan pendidikan, dan perjalanannya berlangsung cukup panjang, yaitu dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan Nasional (*National Education Association*) pada tahun 1857. Negara seperti Atlanta, guru-guru membentuk kumpulan atau kesatuan Guru-guru Sekolah Negeri Atlanta, guna menghadapi tekanan dari Dewan Kota yang akhirnya memberikan dana lebih untuk pendidikan. Di Indonesia MBS lahir sebagai agenda reformasi sekolah, yang ditandai dengan UU RI

Nomor 22 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) merupakan satu jawaban atas desentralisasi pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdikas pasal 51 ayat (1): Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Strategi implementasi MBS meliputi: 1) salah satu strategi adalah menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS, yaitu peningkatan kapasitas serta komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa, 2) pembangunan budaya sekolah (*school culture*) yang demokratis, transparan, dan akuntabel, 3) ketika pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS di sekolah, termasuk pelaksanaan *block grant* yang diterima sekolah, 4) mengembangkan model program pemberdayaan sekolah, bukan hanya sekedar melaksanakan pelatihan MBS saja, yang lebih banyak dipenuhi dengan pemberian informasi sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Haluti, (2019). *Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMA Muhammadiyah Luwuk Kabupaten Banggai*, Vol. 1, No. 2, e-ISSN:2656-9086 hlm . 67–76, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/>
- Boko, Yusri A. dkk (2021). *Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik)*, Bandung, PT. Manggu
- Danim, Sudarwan, (2013). *Otonomi Manajemen Sekolah*, Jakarta, PT. Alfabeta
- Direktorat Dikmenum, (2000). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, PT Depdiknas, Jakarta.
- Hamid, (2013). *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jurnal *Al-Khwarizmi*, Vol. 1, No.1, P-ISSN: 2337-7666 and E-ISSN: 2541-6499 hlm. 87–96, <https://www.academia.edu/>.
- Mulyasa (2012). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta, PT Bumi Aksara
- Mustiningsih. (2015). *Masalah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar*. Jurnal *Manajemen Pendidikan*, Vo 24 No 6, hlm 498–505. <http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/>
- R. Fajrin, (2018). *Strategi Implementasi Sekolah Manajemen Berbasis, Intizam Jurnal Manajemen Pendidik Islam*, Vol. 1, No. 1, ISSN: 2622-6162 (Online)-2598-8514 (Print) hlm. 132–149, <https://ejournal.staidda-krempyang.ac.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, <https://pusdiklat.perpusnas.go.id>
- Usman, Husain, (2011). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Wahyudi, (2010). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) Dalam Rangka Desentralisasi Pendidikan*, Jurnal *Guru Membaca*, Vol. 23, No. 1, ISSN 1410-2846, <https://jurnal.untan.ac.id/>
- Zaini Aziz, Ahmad (2015). *Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif*

*Peningkatan Mutu Pendidikan
Madrasah, eL-Tarbawi, Vol. VIII,
No. 1, P-ISSN: 1979-9985 E-
ISSN: 2714-5492 hlm.70–91,
<https://journal.uii.ac.id>*